

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Simatupang (2019) yang judul penelitiannya Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku Batubara. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan Pelaksana Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku Batubara merupakan program yang memadukan berbagai metode yang meliputi aspek sosial, ketrampilan, kerohanian dan olahraga yang tujuannya agar para narapidana narkotika menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Yuliani, Eva (2018) yang judul penelitiannya Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang memiliki beberapa program pembinaan bagi warga binaan. Program-program pembinaan tersebut yaitu program keagamaan, program pendidikan, program olahraga dan kesenian dan program kemandirian. Adapun faktor pendukung pembinaan warga binaan di Lapas Serang yaitu situasi lapas yang aman dan kondusif, hubungan yang baik antara warga binaan dan pegawai lapas, adanya pelatihan yang bekerjasama dengan instansi lain, instruktur yang berkompeten, sarana dan prasarana yang mendukung serta motivasi yang muncul dari dalam diri warga binaan. Sedangkan faktor penghambat pembinaan warga binaan yaitu kurangnya ruang kamar untuk menempatkan

warga binaan, tidak adanya tenaga pengajar atau pelatih tetap untuk kegiatan rutin yang ada di lapas, minimnya dana untuk modal produksi, tidak adanya suplier bahan baku, minimnya relasi pemasaran.

Selain itu, penelitian Ningtyas (2013) dengan judul Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Malang). Hasil penelitiannya peneliti menemukan bahwa Pembinaan narapidana dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia yang diberikan belum maksimal karena masih terdapat banyak kendala dan peran serta instansi lain juga masyarakat sangat kurang. Hal ini penting diperhatikan karena akhir dari pembinaan ini adalah kembalinya narapidana di tengah masyarakat dengan sehat. Sehingga dalam penelitian tersebut memberikan saran seperti menambah bangunan terkait dengan jumlah narapidana yang overload, inovasi bentuk pembinaan yang edukatif, memperbanyak kerjasama dengan instansi, serta pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa narapidana bukanlah sampah namun mereka harus dibantu untuk lepas dari jeratan tindak kejahatan.

B. Peran Pemerintah

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat (Mangkoesebroto, 2010).

Fungsi pemerintah menurut Richard (Mangkoesebroto, 2010) dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*)
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000:59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu:

1. Pelayanan (*service*)
2. Pemberdayaan (*empowerment*), dan
3. Pembangunan (*development*).

Oleh Ndraha (2001:85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

1. Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Haryanto dkk, 1997 : 36-37).

1. Fungsi Pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.
2. Fungsi Pelayanan. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan

publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

3. Fungsi Pemberdayaan. Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah melalui guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Haryanto dkk,1997:73).

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila di kaitkan

dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada *empowerment*, yaitu upaya sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau cara untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas masyarakat. Melalui suatu kegiatan tertentu, yaitu melakukan kegiatan dengan keadaan dan karakteristik di masyarakat itu sendiri (Sari,2012:13)

Sedangkan kartasasmita dalam Zubaedi (2014:79) menyatakan tiga hal penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pelaksanaan pemberdayaan diupayakan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di upayakan melalui berbagai aktivitas nyata seperti pendidikan, peningkatan kesehatan, pelatihan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar dan sarana prasarana lainnya untuk memperkuat potensi dan daya masyarakat.
3. Melindungi masyarakat (*protecting*). Pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan berupa langkah-langkah untuk mencegah persaingan secara tidak seimbang, atau adanya praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dilakukan dengan cara keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Strategi dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan sasaran pemberdayaan yaitu

masyarakat sebagai subjek yang memiliki keragaman karakter, potensi dan kebutuhan agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut “Soekanto, 1987:63”.

1. Tahap Persiapan Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan Pengkajian “Assessment” Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “feel needs” dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “exchange agent” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama

bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5. Tahap Pelaksanaan “Implementasi” Program Atau Kegiatan Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
6. Tahap Evaluasi Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. Tahap Terminasi Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat, dapat menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Input
 - Sumber daya manusia, yakni tokoh atau pemimpin masyarakat baik tokoh formal maupun informal
 - Besarnya dana yang digunakan, baik dana yang berasal dari kontribusi masyarakat setempat maupun dana yang diperoleh dari bantuan di luar masyarakat tersebut.

- Bahan-bahan, alat-alat atau materi lain yang digunakan untuk menyokong kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

2. Proses

- Jumlah penyuluhan kesehatan dilaksanakan
- Frekuensi dan jenis pelatihan dilaksanakan
- Jumlah tokoh masyarakat atau kader kesehatan yang dilatih sebagai motivator
- Pertemuan-pertemuan masyarakat dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan

3. Output

- Jumlah dan jenis UKBM (upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat), missal : Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, dana Sehat, dan sebagainya.
- Jumlah orang atau anggota masyarakat yang telah meningkat pengetahuan dan perilakunya tentang kesehatan.
- Jumlah anggota keluarga yang mempunyai usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga
- Meningkatkan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat

4. Outcome

- Menurunnya angka kesakitan dalam masyarakat
- Menurunnya angka kematian umum dalam masyarakat
- Menurunnya angka kelahiran dalam masyarakat
- Meningkatnya status gizi anak balita dalam masyarakat

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

1. Proses
2. Pembaharuan, penyempurnaan

3. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Menurut Thoha (2003, h.7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada perbaikan akan sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Menurut Marwansyah dan Mukaram, (2000, h.63) Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk kerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan dan pengembangan. Sedangkan menurut G. Moedjanto, (1993, h.4) Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan perbaikan gizi. Jelas bahwa semakin berkembangnya kehidupan manusia maka bidang-bidang kehidupan akan semakin banyak yang diperhatikan. Jadi hal yang dapat di-simpulkan mengenai pengembangan sumber daya manusia

ialah suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan masalah yang muncul akibat dari perkembangan peradaban manusia.

Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana
 Lembaga Pemasarakatan melakukan pembinaan dengan melalui beberapa jalur, yaitu: a. Pembinaan Keyakinan/keagamaan, b. Pembinaan Kepribadian c. Pembinaan Keterampilan
 Pembinaan narapidana tujuannya bukan hanya mengisi waktu luang selama berada di Lembaga Pemasarakatan, melainkan proses dimana narapidana mampu untuk berubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, menyadari akan kesalahan dan tidak mengulangnya serta berdaya guna sehingga memiliki kualitas dalam hidupnya.

C. Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan Meriee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

- Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Menurut Merilee S. Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti terlihat pada gambar di atas. Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups* , sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih ketimbang menerima kredit sepeda motor; (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan atau kredit kepada masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

D. Strategi

Handari Namawi (2005:147) mengemukakan bahwa “strategi dalam sebuah manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistemik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan statejik organisasi”.

Hax dan Majluf dalam J. Salusu (2003:100-101) mencoba

menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut:

1. ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral
2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya
3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi
4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
5. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya. Oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi (atau komunitas) dan lingkungannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategi, strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. (Bryson, 2001:189).

Sedangkan pengertian strategi menurut J. Salusu (2003:101) adalah “seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”.

Dari beberapa uraian tentang definisi strategi di atas, maka pemahaman penulis bahwa strategi merupakan suatu cara dalam bertindak dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi dengan memperhatikan faktor lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Strategi itu penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala, ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan

rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat, bukan hanya oleh pejabat tingkat tinggi.

E. Sejarah Singkat Pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak SAHARDJO, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.

Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah

dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (UU no. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sub sistem dari Sistem Pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan,

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) lembaga pemasyarakatan kelas IIB muara teweh melaksanakan salah satu proses pembinaan narapidana untuk memulihkan kembali dan menyiapkan terpidana agar kembali kepada masyarakat dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya.

Salah satu upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas IIB muara teweh adalah membina kerohanian untuk semua agama agar menjadi pribadi yang taat beragama dan mempunyai keterampilan setelah keluar atau bebas dari lembaga pemasyarakatan.

